



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT TIM PELAKSANA
TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF INDONESIA**

Hari/ Tanggal : Rabu, 11 Juni 2014
Waktu : 09.00 – 12.30
Tempat : Ruang Serayu, Kemenko Perekonomian Lt.3
Agenda : Rapat Pembahasan Laporan Tahap II Sektor Minerba (2010 – 2011)
dan Kerangka Acuan Penyusunan Laporan III (2012 – 2013)

Peserta Rapat

Perwakilan Pemerintah

1. Kemenko Perekonomian, Kedeputan ESDM : Bambang Adi Winarso, Emy Perdanahari, Budi Utomo
2. Kementerian ESDM, Setjen ESDM : M. Atthar Majid
3. Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan : Unggul Budi
4. Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak : M. Hanif Arkanie, Ahmad Zaki, Yudha
5. Kementerian Keuangan, Ditjen Perimbangan Keuangan : Sandy Firdaus, Irfan Sofi
6. BPKP : Martiknyo, Sendi Zelaturandi, Yus Muharam
7. Kementerian ESDM, SKK Migas : Beti Damayanti
8. Kementerian ESDM, Ditjen Minerba : Tresnasih Jusuf, Indah Relita
9. Kemenko Perekonomian : Rahma RA
10. Kemen. Dalam Negeri, Ditjen Bina Keuangan Daerah : Bejo Mulyono, Ucup Hidayat, Yedi Rahmat
11. Provinsi Kalimantan Timur, Distamben: Banua Panjaitan
12. Provinsi Riau, Distamben: Januaris

Perwakilan Industri, Mineral dan Batubara

13. Muhamad Husein dan Abdul Syakuy (PT. Pertamina Persero)
14. Supriatna Suhala (APBI - ICMA)
15. Mukhlis (IMA)

Perwakilan Masyarakat Sipil

16. Erry Ryana Hardjapamekas
17. Aryanto Nugroho (PYWP Indonesia)
18. Wasingatu Zakiah (IDEA Yogyakarta)
19. Yenny Sucipto (FITRA Jakarta)

Tenaga Ahli Sekretariat Tim Transparansi:

20. *Revenue Specialist*, Ambarsari Dwi Cahyani
21. *Regulatory Specialist*, Ronald Tambunan
22. *IT Specialist*, Tri Wicaksono
23. *Communication Specialist*, Fajar Reksoprodjo
24. *Financial Specialist*, Agus Prasteyono
25. Staff administrasi : Yuliana, Edityas Nur Hutami, Eka Wahyuni, Hadi Purnama

Rekonsiliator KAP Gideon, Adi & Rekan:

26. Ade Ikhwan, Myrnie Zachraini, Angga Hergunowo, Cindy Nur Aini.

Risalah Rapat

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Dr. Bambang Adi Winarso selaku Plt Deputy ESDM pada pukul 09.00 kemudian pada pukul 10.30 rapat dipimpin oleh Dr. Emy Perdanahari karena Plt Deputy ESDM harus hadir pada rapat yang lain. Pembahasan rapat terdiri dari: presentasi dan pembahasan laporan sektor minerba 2010 – 2011 dan draft kerangka acuan laporan tahap III tahun 2012 – 2013.

I. Pembahasan Laporan EITI Indonesia Tahap Kedua Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara

Pembahasan ini dimulai dengan presentasi oleh Sekretariat tentang ringkasan laporan.

Laporan dibagi 6 bab, yaitu : pengantar, penerimaan negara dari sektor minerba, perusahaan minerba, dana bagi hasil, isu dan rekomendasi, dan penutup. Hasil rekonsiliasi 83 perusahaan mineral dan batubara yaitu yang diidentifikasi membayar royalti diatas IDR 25 milyar ditahun 2010 – 2011. Dalam laporan bagian penjelasan lebih banyak karena menjelaskan penyebab perbedaan rekonsiliasi, yaitu adanya kesalahan atau tertukarnya penempatan akun, dan perusahaan yang tidak memberikan informasi hingga tenggat waktu.

Dari rapat teknis pada tanggal 30 Mei, diadakan rapat rekonsiliasi antara Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, Biro Keuangan KESDM, Ditjen Minerba dan Ditjen Anggaran untuk membahas perbedaan yang belum dapat direkonsiliasi sehingga hasilnya cukup signifikan.

Rekonsiliator menjelaskan bahwa setelah rekonsiliasi paska 30 Mei secara ringkas diperoleh perubahan paska 30 Mei sebagai berikut:

2010	Perbedaan per 30 Mei	Paska 30 Mei			
Jenis Penerimaan		Perusahaan Minerba	Minerba, DJP, DJA	Perbedaan Akhir	
Royalti & PHT	181.033	16.299.462	16.358.524	(59.061)	0,4
PPh Badan	(206.344)	33.625.652	33.635.900	(10.248)	0,0
Dividen	-	2.572.351	2.572.351	-	-
Total	(25.311)	52.497.465	52.566.775	(69.310)	0,1

2011	Perbedaan per 30 Mei	Paska 30 Mei			
Jenis Penerimaan		Perusahaan Minerba	Minerba, DJP, DJA	Perbedaan Akhir	
Royalti & PHT	(336.651)	21.304.204	21.317.080	(12.876)	0,1
PPh Badan	(98.154)	42.321.535	42.442.230	(120.695)	0,3
Dividen	-	3.346.292	3.346.292	-	-
Total	(434.805)	66.972.031	67.105.602	(133.571)	0,2

Laporan juga memuat rekomendasi di antaranya perlu tindak lanjut atas yang belum dapat direkonsiliasi; perlu adanya bukti setor yang informatif sehingga dapat diketahui peruntukannya; serta perlu sosialisasi yang intens kepada industri khususnya untuk penyetoran royalti, PHT, dan pajak secara jelas. Beberapa saran dan tanggapan telah dimuat di dalam laporan, di antaranya berasal dari Ditjen Pajak, perwakilan masyarakat sipil, serta Ditjen Perimbangan Keuangan.

Tanggapan dan pertanyaan peserta rapat:

- APBI, Supriatna :

Usulan target awal adalah di atas 25 milyar royalti. Berapa persen dibandingkan dengan total setoran royalti dan pajak. Untuk tahun depan dapat diturunkan batas itu supaya lebih banyak yang berpartisipasi.

Tanggapan Sekretariat : yang tercakup dalam laporan, untuk setoran royalti dari 53 perusahaan di tahun 2010 adalah Rp 10,2 triliun atau 82%; sedangkan untuk setoran 83 perusahaan di tahun 2011 Rp 13,4 triliun atau 83% total royalti tambang nasional. Sedangkan untuk pajak, tahun 2010 dan 2011 adalah Rp 32,2 triliun atau 53% dan Rp 42,3 triliun atau 60% terhadap total pajak dari pertambangan.

- IMA, Mukhlis :

1. Penyempurnaan dalam scoping kita untuk yang akan datang pada prinsipnya seperti itu apa saja yang perlu dimasukkan perlu kita sepakati bersama mana masuk mana tidak; 2. Treshold dari sekretariat dari yang tidak dapat direkonsiliasi sebesar itu apa bisa ditoleransi dengan standar EITI.

- Dr. Emy Perdanahari :

Treshold 25 Milyar telah diketahui oleh Sekretariat Internasional. Ini berarti sudah diterima. Perlu dibuat analisa sensitifitas misalnya treshold diturunkan menjadi 20 Milyar, sebanyak apa perusahaannya.

- PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho :

Temuan kesalahan catat PPh Badan menjadi royalti seharusnya diselesaikan dan ditindaklanjuti supaya laporan EITI punya dampak terhadap perbaikan sistem.

Tanggapan Rekonsiliator: pekerjaan ini bukan audit tetapi membandingkan data yang diserahkan. Rekomendasi masyarakat sipil sudah dimuat dalam laporan.

- Dr. Bambang Adi

Rekonsiliasi bukan audit. Jika diperlukan perbaikan ke depan, ini benar.

- Kemendagri, Ditjen Bina Keuangan Daerah Ucup Hidayat

Terkait dengan nomenklatur pada bab bagi hasil, terdapat kata yang perlu dikoreksi, serta pola penyaluran DBH perlu direvisi dengan perubahan yang baru.

- Kemenkeu, Ditjen Perimbangan Keuangan, Sandy Firdaus

Perihal triwulan V adalah penyaluran untuk memenuhi prinsip realisasi.

Keputusan Pembahasan I:

- o Tim Pelaksana meminta Rekonsiliator melakukan revisi minor untuk yang disampaikan dalam rapat.
- o Tim Pelaksana menyetujui Laporan Tahap II Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara untuk dipublikasi.

II. Pembahasan Draft Kerangka Acuan Laporan Tahap III (2012-2013)

Kerangka Acuan untuk laporan tahap III dipresentasikan dan ditanggapi oleh Tim Pelaksana. Jika sudah disetujui oleh Tim Pelaksana, selanjutnya akan dilakukan pengadaan/lelang perusahaan konsultan Administrator Independen (AI) yang akan bekerja untuk Tim Pelaksana melakukan penyusunan Laporan III.

Laporan III mengikuti Standar Baru EITI 2013. Tugas AI tidak hanya merekonsiliasi tapi juga harus mengumpulkan informasi-informasi terkait dengan *value chain* yang lebih luas dibanding standar EITI yang lama. Pekerjaan administrator akan meliputi laporan awal, data collection, rekonsiliasi awal, identifikasi perbedaan, dan laporan akhir. Timeline pelaporan diperkirakan publikasi pada bulan Juli 2015.

Tanggapan dan pertanyaan peserta rapat:

- IDEA, Wasingatu Zakiyah

Apakah CSR juga mencakup jaminan reklamasi (jamrek) dan informasi analisa sosial. Seharusnya informasi ini perlu dibuka agar publik tahu tentang dampak sosial tambang tersebut.

- APBI, Supriatna Suhala

Tentang informasi yang tidak dapat dibuka, misalnya pajak diperlukan bentuk formal untuk memastikan bahwa perusahaan mau melapor. Untuk jamrek di pertambangan bisa masuk sebagai biaya sosial, tetapi tidak masuk sebagai CSR, karena memang perusahaan wajib bertanggung jawab dalam bentuk reklamasi paska tambang.

- PT. Pertamina (Persero) , Muhamad Husen

Biaya transport ini seperti apa dan mengapa perlu dimasukkan? Jika iya, maka mulai memasukkan industri jasa seperti penyedia jasa pipa gas. Di migas, jaminan reklamasi ini bukan CSR.

Tanggapan Sekretariat untuk CSR ini adalah wajib sebagai bentuk *social payment*. Tetapi apakah meliputi jamrek, ini harus disekapati oleh Tim Pelaksana. Untuk transport merujuk informasi dari Sekretariat Internasional contoh kasusnya seperti pembayaran transpor gas melalui pipa di Rusia.

- Erry Ryana Hardjapamekas

Jika nilainya tidak besar untuk Indonesia, biaya transport tidak dimasukkan. Prinsipnya EITI adalah membuka informasi sehingga dapat memberikan informasi kepada publik tentang industri ekstraktif. Ke depan transparansi harus didorong dan rekomendasi perbaikannya dapat diadopsi oleh instansi pemerintah dan semua pihak yang terkait.

Keputusan Pembahasan II :

Tim Pelaksana menyetujui draft Kerangka Acuan Administrator Independen untuk penyusunan Laporan Tahap III tahun 2012-2013.

III. Kesimpulan

1. Tim Pelaksana menyetujui Laporan Tahap II Sektor Pertambangan Mineral dan Batu Bara tahun 2010-2011.
2. Tim Pelaksana menyetujui draft Kerangka Acuan Administrator Independen untuk penyusunan Laporan Tahap III tahun 2012-2013.

Catatan:

Risalah rapat ini dilengkapi lampiran materi yang telah dipresentasikan dalam rapat.